

**MEKANISME PENGELOLAAN ISU MASYARAKAT MELALUI MEDIA
SOSIAL DPD PARTAI GERINDRA LAMPUNG DALAM PENYAMPAIAN
ASPIRASI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh:

M ARISTOTELES HS

2216021069



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

MEKANISME PENGELOLAAN ISU MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DPD PARTAI GERINDRA LAMPUNG DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

MUHAMMAD ARISTOTELES HASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan media sosial yang mengubah pola komunikasi antara masyarakat dan partai politik dalam penyampaian aspirasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial oleh DPD Partai Gerindra Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kelembagaan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengurus DPD Partai Gerindra Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung, masyarakat, serta akademisi dan pengamat politik. Analisis penelitian menggunakan teori sistem politik David Easton yang meliputi *input*, *process*, dan *output*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu masyarakat diterima melalui media sosial Instagram, TikTok, dan X (Twitter), serta melalui reses dan komunikasi langsung dengan masyarakat. Isu yang diterima kemudian dikelola melalui koordinasi internal partai sebelum diteruskan kepada Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung maupun pemerintah daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa isu yang memperoleh perhatian luas di media sosial cenderung mendapatkan tindak lanjut lebih cepat. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai kanal pelaporan isu masyarakat yang mendukung proses penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi fungsi media sosial dan penyusunan SOP pengelolaan isu agar mekanisme yang berjalan lebih efektif dan terstruktur.

Kata Kunci: Mekanisme Politik, Media Sosial, Partai Politik.

ABSTRACT

THE MECHANISM OF PUBLIC ISSUE MANAGEMENT THROUGH SOCIAL MEDIA BY THE POLITICAL PARTY GERINDRA PROVINCIAL LAMPUNG REGIONAL EXECUTIVE BOARD IN DELIVERING PUBLIC ASPIRATIONS TO THE LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT

By

MUHAMMAD ARISTOTELES HASAN

This research was motivated by the development of social media, which has transformed communication patterns between society and political parties in the process of conveying public aspirations. The study aims to examine the mechanism of public issue management through social media by the Regional Executive Board (DPD) of the Gerindra Party in Lampung in delivering public aspirations to the Lampung Provincial Government. This research employed a qualitative method with an institutional approach through interviews, observation, and documentation. The informants consisted of DPD Gerindra Lampung administrators, members of the Lampung Provincial Legislative Council (DPRD), community representatives, academics, and political observers. The analysis was conducted using David Easton's political system theory, which consists of input, process, and output. The findings reveal that public issues are received through social media platforms such as Instagram, TikTok, and X (Twitter), as well as through legislative recess activities and direct communication with the public. The issues are then managed through internal party coordination before being forwarded to the Gerindra Fraction of the Lampung Provincial DPRD and the provincial government. The study also finds that issues receiving wider attention on social media tend to obtain faster follow-up responses. Therefore, social media functions as a channel for reporting public issues and supporting the process of conveying public aspirations to the government. It is recommended that the DPD Gerindra Lampung optimize the use of social media and establish standard operating procedures (SOPs) for issue management to ensure a more effective and structured mechanism.

Keywords: *Issue Management, Social Media, Political Party.*

**MEKANISME PENGELOLAAN ISU MASYARAKAT MELALUI MEDIA
SOSIAL DPD PARTAI GERINDRA LAMPUNG DALAM PENYAMPAIAN
ASPIRASI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**M ARISTOTELES HS
2216021069**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi

**: MEKANISME PENGELOLAAN ISU
MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL
DPD PARTAI GERINDRA LAMPUNG
DALAM PENYAMPAIAN ASPIRASI
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: M Aristoteles HS

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216021069

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Prof. Arizka Wanganegara, Ph.D.

NIP. 198106202006041003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.SI.

NIP. 19710604200312200

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Arizka Warganegara, Ph.D.

Penguji : Budi Harjo, S.Sos., M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 04 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 April 2026

Yang Membuat Pernyataan



M Aristoteles HS

NPM. 2216021069

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Aristoteles Hasan, dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 05 Mei 2004 yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putra dari Bapak M. Salahuddin HS dan Ibu Junaidah.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Kemala Bhayangkari 2009-2010, dilanjutkan di SDN 04 Tanjung Aman 2010-2016. Setelah lulus SD, Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 07 Kotabumi 2016-2019. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 03 Kotabumi 2019-2022. Pada tahun 2022, Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan non akademik dalam mengasah kemampuan diri. Penulis bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik (Komsospol) Universitas Lampung sejak tahun 2022. Disisi lain, Penulis mengikuti Magang Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan (2022-2023) dan Staff Garda Muda Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Unila Dinas Eksternal (2022-2023). Kemudian, Penulis diamanahkan sebagai Ketua Umum HMJ Ilmu Pemerintahan periode 2024. Pada tahun 2025, Penulis diamanahkan sebagai Kepala Bidang (Kabid) PPPA Komsospol Unila serta Sekretaris Kabinet (Seskab) BEM U KBM Unila periode 2025, walaupun di pertengahan masa kepengurusan Penulis mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Selain itu, Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata

(KKN) di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, serta program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di DPD Gerindra Provinsi Lampung.

MOTTO

Fa inna ma'al-'usri yusra. Inna ma'al-'usri yusra. Artinya: "Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”

(Prabowo Subianto)

“Tidak ada jawaban benar untuk pertanyaan yang salah. Tidak ada pertanyaan yang salah, karena pertanyaan muncul dari rasa keingintahuan”

(M Aristoteles Hs)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga kelak karya ini menjadi ilmu yang bermanfaat

Karya tulis ini khusus saya persembahkan kepada:

Ayah dan Umma tercinta

M Salahuddin HS dan Junaidah

Terima kasih atas semua saran, masukan, dukungan, semangat, cinta, kasih sayang, kerja keras dan pengorbanan serta do'a keselamatan yang telah menghantarkan anaknya menuju gerbang awal kesuksesan.

Terima kasih untuk keluarga Besar "**Jurusan Ilmu Pemerintahan**" dan Almamater tercinta "**Universitas Lampung**"

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul **“Responsivitas Media Sosial DPD Gerindra Lampung Dalam Melakukan Advokasi Persoalan Masyarakat Kepada Pemerintah Provinsi Lampung”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT yang membawa petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Skripsi yang berjudul **“Responsivitas Media Sosial DPD Gerindra Lampung Dalam Melakukan Advokasi Persoalan Masyarakat Kepada Pemerintah Provinsi Lampung”** sebagai salah satu syarat Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui sanwacana ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A, I.P.M, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Terima kasih banyak Ibu atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

4. Bapak Prof. Arizka Warganegara, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa meluangkan waktunya memberi bimbingan, kritik, evaluasi, dan masukan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah Bapak Budi berikan kepada Penulis.
5. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku Dosen Pembahas/Penguji yang senantiasa meluangkan waktunya memberi bimbingan, kritik, evaluasi, dan masukan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah Bapak Budi berikan kepada Penulis.
6. Bapak Dr. R. Pitojo Budionom M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, Terima kasih atas ilmu dan pembelajarannya.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dedikasi, pengalaman, ilmu yang telah diberikan
8. Kepada dua jiwa yang menjadi asal segala langkah Penulis. Ayah, Muhammad Salahuddin HS, dan Umma, Junaidah yang tak pernah lelah menenun bahagia di setiap denyut kehidupan anak-anaknya. Terima kasih atas setiap nasihat yang mengalir laksana mata air kebijaksanaan, atas dukungan yang teguh bagai akar yang mencengkeram bumi, atas semangat yang menyala seperti fajar yang tak pernah ingkar pada pagi. Cinta dan kasih sayang yang kalian limpahkan bukan sekadar rasa, melainkan cahaya yang menuntun langkah, bahkan ketika dunia terasa redup. Di balik setiap keberhasilan yang mulai terajut, tersimpan peluh kerja keras dan pengorbanan yang sunyi, serta doa-doa yang melangit tanpa suara namun selalu sampai, mengantarkan Penulis hingga di ambang gerbang awal kesuksesan. Seandainya waktu berbaik hati menghadiahkan satu kehidupan lagi, maka dalam semesta mana pun kaki ini berpijak, Umma dan Ayah akan tetap menjadi rumah pertama tempat segala rindu pulang, tempat hati berlabuh, tanpa pernah lekang oleh zaman, tanpa pernah berubah oleh waktu.

9. Kepada Saudari Penulis, Haifa Azzahra HS, Zhafira Tartilia HS, dan Maria Zatta Umni HS. Terima kasih untuk masukan, saran, dan dukungan yang senantiasa mengiringi langkah Penulis. Kehadiran kalian bukan sekedar menemani, tetapi menjelma menjadi sosok kakak yang menghangatkan perjalanan hidup Penulis. Tempat berteduh, berbagi, dan tumbuh dalam setiap fase yang dilalui
10. Kepada cinta hidup dan ruang teduh bagi Penulis, Regina Krisna Murti. Terima kasih telah tetap bertahan, bahkan ketika hari-hari berjalan bagai riuh dan badai selama delapan tahun ini. Motivasi yang tak pernah padam, menghidupkan langkah, menguatkan arah, serta menjaga idealisme yang terus Penulis genggam. Terima kasih karena selalu hadir sebagai benteng yang kokoh, tempat Penulis kembali ketika dunia terasa goyah. Mari terus melangkah bersama, selagi usia belum meminta kita berhenti, menggenggam hari-hari yang masih ingin kita perjuangkan, hingga tua menjelma bukan sebagai batas.
11. Kepada Informan Penelitian, Bapak R. Sigit Krisbintoro, Bapak Fauzi Heri, Bang Reynaldo Sitanggang, Mba Yuni, Terima kasih atas waktu, tempat, dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
12. Kepada Bang Anggi, Bang Darmawan, Bang Panji, Bang Tri, Bang Jambronk, Bang Asroni, Bang Agam, Mas Edi, dan seluruh Staff DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Terima kasih telah menerima Penulis dan berbagi waktu, tempat, canda gurau, ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis banyak belajar di lokasi Magang DPD Gerindra Provinsi Lampung

13. Kepada Saudara tak sedarah Penulis “PICIIS”, M Rolantiro Al-Faqih, M Haikal Irsyad, Maulana Fajri, Achmad Fauzan, Fauzi Arfan, Afdal Nurhadi Gupo, Ahlan Sayyid Al Ghiffari, Ahmad Laksa Kesuma, Uwais Al Qarni, Muhammad Iqbal, Terima kasih selalu hadir dalam duka yang kerap menyelimuti, juga dalam suka yang singgah meski hanya sesaat. Mari terus melangkah, menjemput anangan yang berani kita wujudkan menjadi aksi, dan mimpi yang perlahan kita ubah menjadi realita. Tetap hidup, walaupun hari-hari tak selalu berpihak pada harapan
14. Kepada Sahabat Penulis, Elfarabi Shabran Jihadi, M Taufiq Prayusta Mahawisnu, Farel Mawira, Fahriza Marliandika, Farel Ananda, Arya Satwika W, Nurul Gilang Ramadhan, Faturulloh Al Khozi, Darma Ali, M Alfarizie Ramdhani, Ipal Supranggit, Muhammad Ferdiansyah, Samunar Sangun, Adam Harwanda, Muhammad Farid, Fadli Izulhaq, dll, Terima kasih telah menjadi teman sekaligus sahabat Penulis, banyak moment telah terlewat, sementara hanya sedikit dinamika yang benar-benar menemukan jalan keluar. Terima kasih telah selalu menopang raga Penulis, menguatkan di saat rapuh, dan menghidupkan kembali harapan yang nyaris redup.
15. Kepada Sahabat seperjuangan “OFFICI” , Ilham Ali Wardana, Maritza Patroni, Faturrahman Alam, Komang Wisnu Sambuana, Saipul Anwar, Relly Akbar, M Faturrahman Azrie, Ervianda Dwijaya P, Pabo Kurandi, Rizki Juliansyah, Doni Armendo, Rifky Nugraha, Faisal Hardinata, Renaldy Ichsan, Filla Meidiansyah, Alqawiy Putra, Baldan Thoyyibah, Gerswin Tarnama S, Terima kasih atas tiga hingga empat tahun yang telah kita lalui, menerima setiap perbedaan, sekaligus merangkul tanpa syarat. Semoga kehidupan setelah ini mempertemukan kita kembali pada kisah yang dulu hanya terasa seperti fiksi, lalu perlahan menjelma menjadi realita yang benar-benar kita hidupi

16. Kepada Kabinet “HARMONIASASKARA”, Selli Calista P, Alliyah Mutiara, Intan Junika Putri, Fadia Ayu N, Nanda Agil, Rheynaia Ainul, Pabo Kurandi, Faturrahman Alam, Baldan Thooyibah, Relly Akbar, Fadila Putri, Maritza Patroni, Tasya Azhara, Bagi Penulis, kalian bukan sekedar bagian dari sebuah kabinet, tetapi rumah yang pernah dibangun bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses panjang ini, telah memberikan waktu, tenaga, dan kepercayaan yang tidak ternilai
17. Kepada “Grup Magang Gerindra”, Windy Prayoga, Intan Junika Putri, Vrishka Rahma Dani, Dhea Elsyia Fanira, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Penulis.
18. Kepada teman-teman “KKN Rama Murti 2025” , Jeremy Reynold M, Dian Prinatama S, Azzahra Fadhila A, Devani Qori Denilla, Avika Tio Ananda, Qaisara Najla, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Penulis.
19. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, Mei 2026

Penulis

Muhammad Aristoteles Hasan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Mekanisme Politik.....	11
2.1.1 Pengertian Mekanisme Politik.....	11
2.1.2 Teori David Easton Tentang Mekanisme Politik.....	13
2.1.3 Teori Kelembagaan Soewarno Handyaningrat	16
2.2 Media Sosial	18
2.2.1 Pengertian Media Sosial	18
2.2.2 Fungsi Media Sosial	19
2.3 Partai Politik	22
2.3.1 Pengertian Partai Politik	22
2.3.2 Fungsi Partai Politik.....	23
2.4 Kerangka Pikir.....	25
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Fokus Penelitian	30

3.4 Sumber Data	31
3.5 Informan Penelitian	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3. Observasi (Non-Partisipan).....	34
3.7 Teknik Pengolahan Data	35
3.8 Teknik Analisis Data	36
3.9 Teknik Validasi Data.....	38
BAB IV	39
GAMBARAN UMUM	39
4.1 Gambaran Umum	39
4.1.1 Gambaran Umum DPD Partai Gerindra Lampung.....	39
4.1.2 Struktur Organisasi DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung.....	43
4.1.3 Mekanisme Penyampaian Isu Masyarakat di DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung	46
4.1.4 Media Sosial DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung	48
4.1.5 Posisi Gerindra sebagai Partai Pemenang di Provinsi Lampung.....	52
BAB V.....	54
HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1. Mekanisme Pengelolaan Isu Masyarakat	54
5.2 Proses Penyampaian Isu	56
5.3 Proses Pengelolaan Isu	66
5.4 Penyampaian Hasil Pembahasan Isu kepada Pemerintah.....	77
Provinsi Lampung	77
5.5 Respon Pemerintah Provinsi Lampung Terhadap Isu Media Sosial Partai .	83
Gerindra.....	83
BAB VI.....	88
SIMPULAN DAN SARAN	88
6.1 Simpulan.....	88
6.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	96
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Mekanisme Pengelolaan Isu	14
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 3. 1 Sekretariat DPD Gerindra Lampung	40
Gambar 4. 1 RMD Sebagai Gubernur dan Ketua DPD	42
Gambar 5. 1 Pengelolaan Media Sosial DPD Gerindra Lampung.....	49
Gambar 6. 1 Kolom komentar DPD Gerindra menjadi tempat pengaduan	50
Gambar 7. 1 Pemanfaatan Media Sosial DPD Gerindra Lampung.....	57
Gambar 8. 1 Bentuk Aspirasi Masyarakat	58
Gambar 9. 1 Kegiatan Reses Anggota Dewan Fraksi Gerindra.....	61
Gambar 10. 1 Kegiatan PIP-WK Anggota Dewan Fraksi Gerindra	62
Gambar 11. 1 Proses Koordinasi Internal	67
Gambar 12. 1 Proses Tindak Lanjut Isu kepada Pemerintah Provinsi Lampung / Pihak Terkait	79
Gambar 13. 1 Hasil Proses Disposisi Isu	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informan Penelitian.....	32
Tabel 2 1 Struktur Pengurus DPD Gerindra Lampung	44

DAFTAR SINGKATAN

DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FISIP	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
GERINDRA	: Gerakan Indonesia Raya
LAPOR	: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PEMPROV	: Pemerintah Provinsi
PIP – WK	: Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SOP	: <i>Standar Operating Procedure</i>
UNILA	: Universitas Lampung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan terhadap pola interaksi masyarakat dengan lembaga politik. Kehadiran media sosial menjadikan penyebaran informasi berlangsung lebih cepat, terbuka, dan mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan media sosial tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana komunikasi personal, melainkan telah berkembang menjadi ruang publik digital yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan opini, kritik, aspirasi, hingga berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyampaikan persoalan secara langsung kepada institusi politik tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang. Situasi ini menunjukkan bahwa perkembangan media sosial telah menciptakan pola komunikasi baru antara masyarakat dan lembaga politik yang berlangsung secara lebih dinamis dan interaktif.

Perubahan pola komunikasi tersebut turut memengaruhi cara masyarakat dalam menyampaikan persoalan publik kepada pemerintah maupun partai politik. Berbagai isu yang berkaitan dengan pelayanan publik, kondisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, lingkungan, hingga persoalan administratif daerah sering kali disampaikan masyarakat melalui kolom komentar, pesan langsung, maupun unggahan pada akun media sosial

lembaga politik. Media sosial dipilih masyarakat karena dianggap mampu memberikan akses komunikasi yang lebih cepat dan terbuka dibandingkan mekanisme penyampaian aspirasi secara konvensional. Selain itu, tingginya penggunaan media sosial di tengah masyarakat turut menyebabkan ruang digital menjadi salah satu medium utama dalam pembentukan komunikasi publik antara masyarakat dan institusi politik.

Dalam sistem politik demokratis, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya berorientasi pada aktivitas politik elektoral, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menerima dan menghubungkan berbagai kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Pada perkembangan komunikasi politik digital saat ini, fungsi penyaluran aspirasi tersebut turut mengalami penyesuaian, khususnya melalui pemanfaatan media sosial sebagai ruang komunikasi dengan masyarakat. Partai politik dituntut mampu menyesuaikan pola komunikasi kelembagaannya agar dapat menerima dan mengelola berbagai persoalan masyarakat yang disampaikan melalui ruang digital secara efektif dan terstruktur.

Pemanfaatan media sosial oleh partai politik pada akhirnya tidak hanya digunakan sebagai sarana publikasi kegiatan politik ataupun penyebaran informasi kelembagaan. Media sosial juga berkembang menjadi medium penerimaan isu masyarakat yang memerlukan respons dan tindak lanjut. Persoalan yang disampaikan masyarakat melalui media sosial pada umumnya memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi substansi, tingkat urgensi, maupun pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan partai politik perlu memiliki mekanisme tertentu dalam mengelola isu yang diterima agar setiap persoalan dapat diproses sesuai dengan kebutuhan penanganannya. Dengan demikian, pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial memerlukan alur kerja kelembagaan yang jelas agar proses penyampaian aspirasi dapat berjalan secara sistematis.

Dalam konteks pengelolaan media sosial, DPD Partai Gerindra Lampung menjadi salah satu partai politik di Provinsi Lampung yang memanfaatkan

media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Keberadaan akun media sosial partai memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kondisi daerah maupun pelayanan publik. Persoalan tersebut muncul dalam bentuk komentar, pesan langsung, unggahan ulang, maupun laporan masyarakat yang ditujukan kepada akun media sosial partai. Melalui aktivitas tersebut, media sosial partai tidak hanya berfungsi sebagai media informasi politik, tetapi juga menjadi ruang penerimaan berbagai isu masyarakat yang berkembang di Provinsi Lampung.

DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung merupakan salah satu partai politik yang memiliki posisi kuat dalam dinamika politik daerah di Provinsi Lampung. Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Gerindra berhasil memperoleh suara dan kursi legislatif yang signifikan sehingga menempatkan partai tersebut sebagai salah satu partai pemenang di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Partai Gerindra memiliki hubungan politik dan komunikasi kelembagaan yang cukup kuat dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam konteks pengelolaan isu masyarakat, posisi tersebut menyebabkan berbagai aspirasi maupun persoalan yang diterima melalui media sosial partai memiliki peluang lebih besar untuk diteruskan dan memperoleh tindak lanjut dari pemerintah daerah. Menurut (Budiardjo, 2015), partai politik memiliki fungsi sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam proses penyaluran kepentingan publik. Oleh karena itu, posisi DPD Partai Gerindra Lampung sebagai partai pemenang turut memengaruhi kuatnya hubungan koordinasi dalam proses penyampaian isu masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Isu masyarakat yang diterima melalui media sosial tersebut selanjutnya dikelola oleh pihak internal DPD Partai Gerindra Lampung sebelum diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Lampung ataupun instansi terkait lainnya. Dalam prosesnya, isu yang masuk tidak secara langsung disampaikan kepada pemerintah, melainkan terlebih dahulu melalui beberapa tahapan pengelolaan. Tahapan tersebut meliputi penerimaan isu, identifikasi persoalan, pengelompokan isu berdasarkan substansi permasalahan,

koordinasi internal, hingga penyampaian kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadap persoalan tersebut. Adanya tahapan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan isu masyarakat dalam partai politik berlangsung melalui mekanisme kelembagaan yang melibatkan prosedur dan pola koordinasi tertentu.

Mekanisme pengelolaan isu masyarakat menjadi penting karena setiap persoalan yang diterima memiliki tingkat urgensi dan kebutuhan penanganan yang berbeda. Beberapa persoalan dapat langsung diteruskan kepada pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan publik yang mendesak, sedangkan sebagian lainnya memerlukan verifikasi serta pengkajian internal terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada pihak terkait. Selain itu, terdapat pula proses disposisi atau tindak lanjut yang menentukan bagaimana suatu isu diteruskan kepada lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelesaiannya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan isu masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penerimaan aspirasi, melainkan juga menyangkut bagaimana suatu persoalan diproses secara kelembagaan hingga memperoleh tindak lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada mekanisme pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial oleh DPD Partai Gerindra Lampung dalam penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana isu masyarakat diterima melalui media sosial, bagaimana proses pengelolaan dilakukan oleh pihak internal partai, bagaimana mekanisme penyampaian isu kepada pemerintah provinsi dilakukan, serta bagaimana tindak lanjut terhadap isu tersebut berlangsung. Penelitian ini tidak membahas peran politik partai maupun faktor-faktor politik lainnya, melainkan secara khusus mengkaji proses kelembagaan dalam pengelolaan isu masyarakat yang berlangsung melalui media sosial.

Penelitian mengenai mekanisme pengelolaan isu masyarakat menjadi penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran mengenai pola komunikasi kelembagaan antara masyarakat, partai politik, dan pemerintah daerah dalam

ruang digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana penghubung antara persoalan masyarakat dengan pemerintah daerah melalui proses pengelolaan yang dijalankan oleh partai politik. Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat diketahui bagaimana alur penerimaan, pengelolaan, penyampaian, serta tindak lanjut isu masyarakat berjalan dalam mekanisme kelembagaan DPD Partai Gerindra Lampung.

Pada kajian-kajian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, banyak penelitian yang membahas mengenai penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat, komunikasi politik digital, serta pengelolaan pengaduan publik dalam ruang digital. Media sosial dipandang sebagai medium komunikasi yang mampu mempertemukan masyarakat dengan lembaga politik maupun pemerintah secara lebih terbuka, cepat, dan interaktif. Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi digital telah mengubah pola hubungan antara masyarakat dan institusi politik, khususnya dalam proses penyampaian persoalan masyarakat, pengelolaan isu publik, hingga tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan melalui media sosial. Akan tetapi, penelitian-penelitian sebelumnya masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek komunikasi politik, partisipasi publik, serta penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi dan aspirasi masyarakat. Sementara itu, kajian mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan isu masyarakat berlangsung dalam kelembagaan partai politik, mulai dari penerimaan isu melalui media sosial, proses pengelolaan internal, penyampaian kepada pemerintah daerah, hingga tindak lanjut terhadap isu tersebut masih belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis mencantumkan lima penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan isu masyarakat, media sosial, serta mekanisme komunikasi kelembagaan politik, sebagai berikut:

1. Penelitian Pertama (Bambang Arianto, 2021) yang berjudul *Media Sosial sebagai Saluran Aspirasi Kewargaan: Studi Pembahasan RUU Cipta Kerja*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial

telah berkembang menjadi ruang partisipasi publik dalam menyampaikan opini, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung dalam pembahasan isu publik melalui komunikasi digital yang berlangsung secara cepat dan terbuka. Dalam praktiknya, media sosial tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi politik, tetapi juga menjadi medium penyampaian tuntutan masyarakat terhadap kebijakan negara. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan komunikasi digital telah menciptakan pola hubungan baru antara masyarakat dan institusi politik melalui ruang komunikasi yang lebih partisipatif. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, temuan Bambang Arianto memberikan pemahaman bahwa media sosial memiliki fungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi publik. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada partisipasi masyarakat dalam diskursus kebijakan nasional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada mekanisme kelembagaan pengelolaan isu masyarakat oleh DPD Partai Gerindra Lampung hingga proses penyampaian kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Penelitian Kedua (Fit Yanuar dan Daesy Ekayanthi, 2020) yang berjudul *Analisis Pemanfaatan Media Sosial di Indonesia untuk Penyampaian Aspirasi Politik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi medium komunikasi politik yang efektif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada lembaga politik. Penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan media sosial menyebabkan pola komunikasi politik berubah dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan interaktif. Media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan publik secara langsung kepada institusi politik tanpa melalui mekanisme komunikasi konvensional. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa media sosial

mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi politik digital. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, temuan tersebut memperkuat pemahaman bahwa media sosial memiliki posisi penting dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, penelitian Fit Yanuar dan Daesy Ekayanthi lebih berfokus pada transformasi komunikasi politik digital secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara khusus mengkaji proses pengelolaan isu masyarakat dalam mekanisme kelembagaan partai politik.

3. Penelitian Ketiga (Anindita Lintang Pakuningjati, 2015) yang berjudul *Pengelolaan Media Sosial dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pengelolaan Media Sosial LAPOR! sebagai Sarana Aspirasi dan Pengaduan Rakyat secara Online oleh Deputi I Kantor Staf Presiden)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aspirasi masyarakat melalui media sosial memerlukan mekanisme kerja yang terstruktur agar setiap persoalan dapat diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan. Penelitian ini menjelaskan bahwa proses pengelolaan aspirasi masyarakat meliputi tahapan penerimaan laporan, verifikasi data, pengelompokan isu, hingga disposisi kepada lembaga terkait. Selain itu, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah apabila didukung dengan sistem pengelolaan yang jelas. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penelitian Anindita Lintang Pakuningjati memiliki persamaan pada pembahasan mengenai mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat melalui media sosial. Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada lembaga pemerintah melalui platform *LAPOR!*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada partai politik, khususnya DPD Partai Gerindra Lampung, dalam mengelola isu masyarakat dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

4. Penelitian Keempat (Fandi Rizki Rosyari dkk.) yang berjudul *Efektivitas Pengelolaan Data Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda) pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran DPD RI*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aspirasi masyarakat memerlukan koordinasi kelembagaan yang jelas agar proses penanganan isu dapat berjalan secara efektif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses pengelolaan aspirasi masyarakat melibatkan tahapan penginputan data, identifikasi persoalan, pengolahan informasi, hingga penyampaian kepada pihak terkait. Selain itu, penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa mekanisme kelembagaan memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan aspirasi masyarakat dalam institusi politik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penelitian Fandi Rizki Rosyari dkk. memiliki persamaan pada pembahasan mengenai mekanisme kelembagaan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada lembaga legislatif nasional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada proses pengelolaan isu masyarakat yang diterima melalui media sosial partai politik hingga diteruskan kepada pemerintah daerah.
5. Penelitian Kelima (Michael G.H. Goni dkk.) yang berjudul *Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014–2019*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyerapan aspirasi masyarakat memerlukan komunikasi yang berkelanjutan antara masyarakat dan lembaga politik. Penelitian ini menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat diterima melalui berbagai bentuk komunikasi, kemudian dikaji dan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadap persoalan tersebut. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa proses penyerapan aspirasi tidak hanya berkaitan dengan penerimaan keluhan masyarakat, tetapi juga menyangkut bagaimana suatu persoalan diproses hingga memperoleh tindak lanjut. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penelitian Michael G.H. Goni dkk.

memiliki persamaan pada pembahasan mengenai proses penerimaan dan pengelolaan aspirasi masyarakat. Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada anggota DPRD sebagai aktor legislatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada mekanisme pengelolaan isu masyarakat oleh institusi partai politik melalui media sosial.

Gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik membahas mekanisme pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial oleh partai politik di tingkat daerah hingga proses penyampaian kepada pemerintah daerah dan tindak lanjut terhadap isu tersebut. Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak membahas media sosial sebagai sarana komunikasi politik, partisipasi publik, pembentukan opini masyarakat, maupun pengelolaan pengaduan pada lembaga pemerintah. Sementara itu, pembahasan mengenai bagaimana isu masyarakat diterima melalui media sosial partai politik, dikelola secara internal, diteruskan kepada pemerintah daerah, hingga memperoleh disposisi atau tindak lanjut masih belum banyak dikaji secara mendalam.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menempatkan media sosial hanya sebagai medium komunikasi politik ataupun sarana penyampaian informasi publik. Padahal, dalam praktiknya media sosial juga digunakan sebagai ruang penerimaan persoalan masyarakat yang memerlukan proses pengelolaan kelembagaan secara sistematis. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan memfokuskan perhatian pada mekanisme pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial oleh DPD Partai Gerindra Lampung dalam penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung, mulai dari proses penerimaan isu, pengelolaan internal, penyampaian kepada pemerintah daerah, hingga tindak lanjut terhadap isu masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh Peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah mekanisme pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial oleh DPD Partai Gerindra Lampung dalam proses penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial oleh DPD Partai Gerindra Lampung dalam proses penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian akademik dalam bidang komunikasi politik digital dan pendekatan kelembagaan, khususnya mengenai mekanisme pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial oleh partai politik dalam proses penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian mengenai proses pengelolaan isu publik, komunikasi kelembagaan politik, serta mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat dalam ruang digital.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi DPD Partai Gerindra Lampung dalam mengelola isu masyarakat melalui media sosial, khususnya dalam proses penerimaan, pengelolaan, penyampaian, serta tindak lanjut terhadap persoalan masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah

Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme komunikasi kelembagaan antara partai politik dan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti isu masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mekanisme Politik

2.1.1 Pengertian Mekanisme Politik

Mekanisme politik merupakan proses yang berlangsung dalam sistem politik untuk menerima, mengelola, dan merespons berbagai tuntutan maupun persoalan yang berasal dari masyarakat. Dalam praktiknya, mekanisme politik tidak hanya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan, tetapi juga mencakup bagaimana suatu institusi politik menerima aspirasi publik, melakukan pengelolaan isu, hingga menghasilkan bentuk respons terhadap persoalan masyarakat. Menurut (Budiardjo, 2015), sistem politik terdiri atas berbagai proses dan hubungan yang berkaitan dengan penyaluran kepentingan masyarakat kepada pemerintah melalui lembaga-lembaga politik. Dengan demikian, mekanisme politik dapat dipahami sebagai alur kerja dalam sistem politik yang menghubungkan masyarakat dengan institusi politik maupun pemerintah.

Dalam perkembangan komunikasi digital, mekanisme politik mengalami perubahan dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat. Kehadiran media sosial menyebabkan proses penerimaan isu masyarakat berlangsung lebih terbuka dan cepat dibandingkan mekanisme komunikasi konvensional. Persoalan masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui prosedur administratif secara formal kini dapat diteruskan secara langsung melalui ruang digital kepada lembaga politik maupun pemerintah

daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian dari mekanisme politik modern dalam proses penerimaan dan distribusi isu masyarakat.

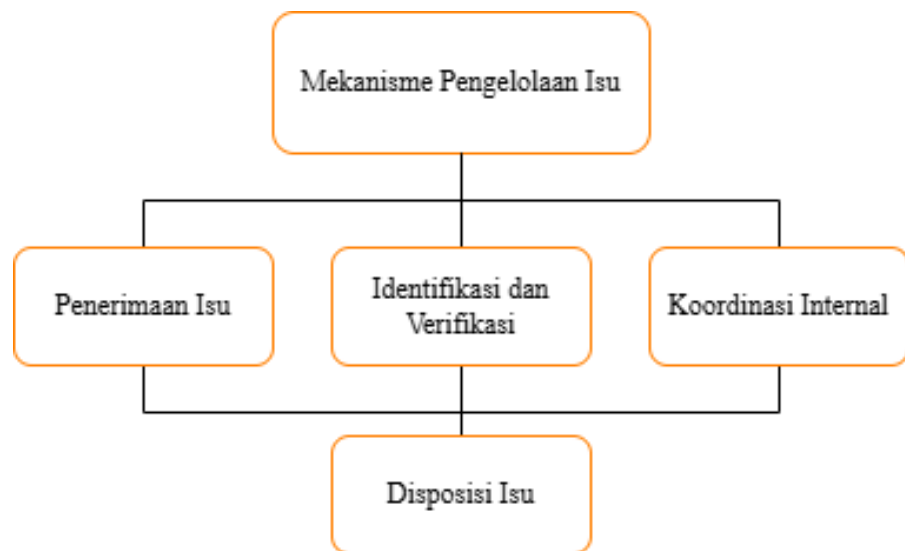
Mekanisme politik juga berkaitan dengan bagaimana suatu institusi melakukan pengelolaan terhadap isu yang diterima dari masyarakat. Isu yang masuk tidak selalu dapat langsung diteruskan kepada pemerintah, melainkan memerlukan proses identifikasi, pengelompokan, koordinasi internal, hingga disposisi kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadap persoalan tersebut. Menurut (Easton, 1965), mekanisme dalam sistem politik berlangsung melalui proses pengelolaan tuntutan masyarakat yang kemudian menghasilkan respons tertentu dari institusi politik. Oleh sebab itu, mekanisme politik tidak hanya dipahami sebagai proses kekuasaan, tetapi juga sebagai proses pengelolaan aspirasi masyarakat dalam sistem politik.

Dalam penelitian ini, mekanisme politik dipahami sebagai proses penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian isu masyarakat melalui media sosial DPD Partai Gerindra Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Mekanisme tersebut melibatkan proses masuknya isu masyarakat sebagai *input*, pengelolaan isu dalam internal partai sebagai *process*, hingga tindak lanjut terhadap isu masyarakat sebagai *output*. Dengan demikian, mekanisme politik dalam penelitian ini difokuskan pada alur pengelolaan isu masyarakat yang berlangsung dalam hubungan antara masyarakat, partai politik, dan pemerintah daerah.

2.1.2 Teori David Easton Tentang Mekanisme Politik

Mekanisme politik pada dasarnya merupakan suatu proses yang berlangsung dalam sistem politik untuk menghubungkan tuntutan masyarakat dengan lembaga politik maupun pemerintah. Proses tersebut mencakup bagaimana aspirasi, persoalan, maupun

kepentingan masyarakat diterima, dikelola, dan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadap penyelesaian persoalan tersebut. Menurut (Budiardjo, 2015), politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan proses penyaluran kepentingan masyarakat melalui berbagai lembaga politik dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme politik dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang mengatur jalannya penyampaian dan pengelolaan kepentingan masyarakat dalam sistem politik.



Gambar 1. 1 Proses Mekanisme Pengelolaan Isu

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Dalam praktiknya, mekanisme politik berlangsung melalui hubungan antara masyarakat, lembaga politik, dan pemerintah. Masyarakat berperan sebagai pihak yang menyampaikan tuntutan atau persoalan, sedangkan lembaga politik berfungsi sebagai pihak yang menerima serta mengelola tuntutan tersebut sebelum diteruskan kepada pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme politik tidak berlangsung secara sederhana, melainkan melalui tahapan dan hubungan koordinasi tertentu antar lembaga politik dan pemerintahan. Menurut (Almond & Powell, 1966), mekanisme politik dalam sistem politik modern berlangsung melalui proses

distribusi tuntutan masyarakat kepada lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, mekanisme politik memiliki hubungan erat dengan proses pengelolaan aspirasi masyarakat dalam sistem pemerintahan.

Perkembangan teknologi komunikasi juga memengaruhi perubahan mekanisme politik dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Pada era digital, proses penyampaian persoalan publik tidak lagi hanya dilakukan melalui komunikasi formal, tetapi juga melalui media sosial sebagai ruang komunikasi publik. Media sosial memungkinkan masyarakat menyampaikan berbagai isu secara langsung kepada institusi politik tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang. Menurut (Cangara, 2016), perkembangan komunikasi politik digital menyebabkan proses penyampaian informasi politik berlangsung lebih cepat, terbuka, dan interaktif antara masyarakat dan lembaga politik. Oleh sebab itu, media sosial menjadi bagian dari perkembangan mekanisme politik modern dalam proses penerimaan isu masyarakat.

Dalam penelitian ini, pengertian mekanisme politik diarahkan pada proses penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian isu masyarakat melalui media sosial DPD Partai Gerindra Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Mekanisme tersebut mencakup bagaimana isu diterima dari masyarakat, dikelola dalam internal partai, hingga diteruskan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk tindak lanjut terhadap persoalan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme politik dalam penelitian ini dipahami sebagai alur proses pengelolaan isu masyarakat dalam hubungan kelembagaan antara masyarakat, partai politik, dan pemerintah daerah.

2.1.3 Teori Kelembagaan Soewarno Handyaningrat

Teori kelembagaan digunakan untuk memahami bagaimana suatu organisasi menjalankan mekanisme kerja, koordinasi, serta proses distribusi informasi dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi politik, pendekatan kelembagaan tidak hanya melihat institusi sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki prosedur, hubungan kerja, dan pola koordinasi dalam menjalankan aktivitas organisasi. Menurut (Handyaningrat, 1996), kelembagaan berkaitan dengan proses pengaturan hubungan kerja dan koordinasi antarbagian dalam organisasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara teratur dan sistematis. Dengan demikian, teori kelembagaan digunakan untuk melihat bagaimana suatu proses berlangsung dalam mekanisme internal organisasi.

Dalam suatu kelembagaan, setiap informasi maupun persoalan yang diterima organisasi akan melalui alur kerja tertentu sebelum diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadap persoalan tersebut. Proses tersebut melibatkan koordinasi, pembagian tugas, serta distribusi informasi antarbagian dalam organisasi. Menurut (Handyaningrat, 1996), koordinasi merupakan usaha untuk menyelaraskan aktivitas organisasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, koordinasi menjadi bagian penting dalam proses kelembagaan karena menentukan bagaimana suatu informasi diproses dalam organisasi.

Teori kelembagaan juga menjelaskan bahwa organisasi memiliki mekanisme administrasi yang digunakan untuk mengatur proses penerimaan, pengolahan, dan penyampaian informasi. Mekanisme tersebut diperlukan agar setiap persoalan yang diterima organisasi dapat diproses secara sistematis dan tidak berjalan tanpa prosedur

yang jelas. Dalam konteks pengelolaan isu masyarakat, mekanisme kelembagaan berkaitan dengan bagaimana isu diterima, diidentifikasi, dikelola, hingga didistribusikan kepada pihak terkait. Menurut (Widjaja, 2010), mekanisme administrasi dalam organisasi diperlukan untuk mengatur distribusi informasi dan pelaksanaan kerja agar berjalan secara terstruktur. Dengan demikian, teori kelembagaan membantu menjelaskan bagaimana alur pengelolaan isu berlangsung dalam organisasi politik.

Dalam penelitian ini, teori kelembagaan digunakan untuk melihat bagaimana mekanisme internal DPD Partai Gerindra Lampung berjalan dalam proses pengelolaan isu masyarakat. Isu yang diterima melalui media sosial tidak secara langsung diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, melainkan terlebih dahulu melalui proses koordinasi internal, identifikasi isu, disposisi, serta distribusi informasi kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadap persoalan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan isu masyarakat berlangsung melalui mekanisme kelembagaan yang melibatkan prosedur dan hubungan kerja tertentu dalam organisasi.

Penggunaan teori kelembagaan dalam penelitian ini juga berkaitan dengan fokus penelitian yang membahas proses pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial. Teori ini digunakan untuk memperkuat analisis pada tahap *process* dalam teori sistem politik David Easton, khususnya dalam melihat bagaimana mekanisme koordinasi dan pengelolaan isu berjalan dalam internal partai politik. Dengan demikian, teori kelembagaan membantu menjelaskan bagaimana suatu isu masyarakat diproses secara kelembagaan sebelum diteruskan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat.

2.2 Media Sosial

2.2.1 Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan media berbasis internet yang digunakan untuk melakukan interaksi, pertukaran informasi, serta penyebaran berbagai bentuk komunikasi dalam ruang digital. Kehadiran media sosial menyebabkan proses komunikasi berlangsung secara lebih terbuka dan interaktif karena setiap pengguna dapat menjadi pihak yang memproduksi maupun menyebarkan informasi. Menurut (Nasrullah, 2017), media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya, berinteraksi, bekerja sama, berbagi informasi, serta membangun hubungan sosial secara virtual. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik digital yang mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi, media sosial telah menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Masyarakat memanfaatkan media sosial untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, hingga menyebarkan berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Menurut (Van Dijk, 2013), media sosial merupakan platform komunikasi digital yang memungkinkan pengguna membangun jaringan komunikasi dan menyebarkan informasi secara cepat dalam ruang virtual. Kondisi tersebut menyebabkan media sosial berkembang menjadi medium komunikasi yang memiliki pengaruh besar terhadap proses pertukaran informasi di tengah masyarakat.

Karakteristik media sosial yang bersifat cepat, terbuka, dan interaktif menjadikan media sosial berbeda dengan media komunikasi konvensional. Informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat diterima dan disebarkan kembali oleh pengguna lain dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, media sosial memungkinkan

terjadinya komunikasi dua arah antara masyarakat dengan institusi tertentu tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Menurut (McQuail, 2011), perkembangan media digital menyebabkan pola distribusi informasi menjadi lebih terbuka dan tidak lagi terbatas pada komunikasi satu arah. Oleh sebab itu, media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi publik.

Dalam konteks komunikasi publik, media sosial juga digunakan sebagai ruang penyampaian berbagai persoalan masyarakat kepada institusi politik maupun pemerintah. Masyarakat dapat menyampaikan kritik, keluhan, maupun aspirasi secara langsung melalui komentar, pesan langsung, maupun unggahan digital pada akun media sosial lembaga tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan atau komunikasi personal, tetapi juga sebagai medium penyampaian isu publik dalam ruang digital.

Dalam penelitian ini, media sosial dipahami sebagai ruang komunikasi digital yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan kepada DPD Partai Gerindra Lampung. Isu yang disampaikan melalui media sosial selanjutnya menjadi bagian awal dalam mekanisme pengelolaan isu masyarakat sebelum diproses lebih lanjut dalam internal partai politik. Dengan demikian, media sosial dalam penelitian ini diposisikan sebagai ruang masuknya isu masyarakat dalam mekanisme politik dan kelembagaan partai politik.

2.2.2 Fungsi Media Sosial

Perkembangan media sosial pada era digital menyebabkan perubahan dalam pola penyampaian aspirasi masyarakat kepada institusi politik maupun pemerintah. Media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi,

tetapi juga berkembang menjadi ruang penerimaan berbagai persoalan publik yang disampaikan masyarakat secara langsung. Menurut (Nasrullah, 2017), media sosial memiliki fungsi sebagai medium interaktif yang memungkinkan pengguna menyampaikan dan mendistribusikan informasi secara terbuka dalam ruang digital. Kondisi tersebut menyebabkan media sosial menjadi salah satu sarana yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun keluhan terhadap persoalan publik.

Dalam praktik komunikasi publik, media sosial memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, kondisi daerah, maupun kebijakan pemerintah. Penyampaian aspirasi yang sebelumnya dilakukan melalui prosedur administratif secara formal kini dapat dilakukan secara lebih cepat melalui komentar, pesan langsung, maupun unggahan digital pada akun media sosial lembaga tertentu. Menurut (Cangara, 2016), perkembangan komunikasi digital menyebabkan proses komunikasi antara masyarakat dan lembaga politik berlangsung secara lebih terbuka dan partisipatif. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai ruang komunikasi publik yang mempertemukan masyarakat dengan institusi politik secara langsung.

Media sosial juga memungkinkan masyarakat menyampaikan isu secara lebih luas karena informasi yang disampaikan dapat tersebar dengan cepat melalui interaksi digital antar pengguna. Persoalan yang awalnya disampaikan oleh individu tertentu dapat berkembang menjadi perhatian publik melalui proses distribusi ulang informasi seperti komentar, unggahan ulang, maupun respons dari pengguna lainnya. Menurut (Rogers, 2003), penyebaran informasi dalam komunikasi digital berlangsung melalui proses pertukaran pesan yang memungkinkan suatu informasi diterima dan diteruskan secara cepat dalam jaringan komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, media

sosial memiliki fungsi penting dalam proses penyebaran dan penerimaan aspirasi masyarakat dalam ruang digital.

Selain sebagai ruang penyampaian aspirasi, media sosial juga berfungsi sebagai ruang penerimaan isu oleh institusi politik maupun pemerintah. Berbagai persoalan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial menjadi sumber informasi awal yang dapat digunakan institusi tertentu untuk memahami kondisi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan lembaga politik mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana penerimaan isu masyarakat sebelum diproses lebih lanjut dalam mekanisme internal organisasi. Menurut (Van Dijk, 2013), media sosial memungkinkan terjadinya komunikasi partisipatif yang mempertemukan masyarakat dengan institusi melalui proses pertukaran informasi secara langsung. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang penerimaan aspirasi masyarakat.

Dalam penelitian ini, fungsi media sosial dipahami sebagai wadah penerimaan aspirasi digital masyarakat yang digunakan oleh DPD Partai Gerindra Lampung dalam menerima berbagai isu publik. Isu yang disampaikan masyarakat melalui media sosial menjadi bagian awal dari proses pengelolaan isu dalam mekanisme internal partai politik sebelum diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Lampung maupun instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, media sosial dalam penelitian ini diposisikan sebagai ruang penerimaan aspirasi masyarakat dalam mekanisme politik dan kelembagaan partai politik.

2.3 Partai Politik

2.3.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu lembaga politik yang memiliki peran dalam menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pemerintah dalam sistem politik. Keberadaan partai politik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas politik elektoral, tetapi juga berkaitan dengan proses penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui mekanisme politik tertentu. Menurut (Budiardjo, 2015), partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi dan tujuan yang sama untuk memperoleh serta mempertahankan kekuasaan politik melalui cara-cara konstitusional. Dalam perkembangannya, partai politik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses penyampaian kepentingan publik.

Dalam sistem politik demokratis, partai politik menjadi salah satu institusi yang menerima berbagai tuntutan dan persoalan masyarakat sebelum diteruskan kepada pemerintah. Berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik, kebijakan daerah, maupun kondisi sosial dapat disampaikan kepada partai politik sebagai bagian dari proses komunikasi politik. Menurut (Almond & Powell, 1966), partai politik memiliki fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat dalam sistem politik. Dengan demikian, partai politik berperan dalam menerima dan mengelola berbagai isu masyarakat sebelum diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadap penyelesaian persoalan tersebut.

Perkembangan teknologi komunikasi digital juga memengaruhi perubahan pola komunikasi partai politik dengan masyarakat. Media sosial menyebabkan proses komunikasi politik berlangsung lebih terbuka dan interaktif sehingga masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada partai politik. Kondisi

tersebut menjadikan partai politik tidak hanya berfungsi sebagai organisasi politik formal, tetapi juga sebagai ruang penerimaan isu masyarakat dalam komunikasi digital. Menurut (Cangara, 2016), perkembangan komunikasi politik digital menyebabkan hubungan antara masyarakat dan institusi politik berlangsung secara lebih cepat dan partisipatif. Oleh sebab itu, partai politik mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi sekaligus ruang penerimaan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, partai politik dipahami sebagai institusi yang memiliki mekanisme dalam menerima, mengelola, dan menyampaikan isu masyarakat kepada pemerintah daerah. DPD Partai Gerindra Lampung menjadi bagian dari proses tersebut melalui pengelolaan isu masyarakat yang diterima dari media sosial sebelum diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Lampung maupun instansi terkait lainnya. Dengan demikian, partai politik dalam penelitian ini diposisikan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mekanisme pengelolaan isu masyarakat.

2.3.2 Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk untuk menjadi sarana penyaluran kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan. Keberadaan partai politik memiliki hubungan yang erat dengan proses komunikasi antara masyarakat dan pemerintah karena partai politik berfungsi sebagai penghubung berbagai aspirasi publik dalam sistem politik. Menurut (Budiardjo, 2015), partai politik adalah kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi dan cita-cita yang sama serta bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik melalui cara-cara konstitusional. Dengan demikian, partai politik tidak hanya dipahami sebagai organisasi politik, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki fungsi dalam proses penyampaian kepentingan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam sistem politik demokratis, partai politik menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai tuntutan maupun persoalan publik. Aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik, kondisi sosial, maupun kebijakan pemerintah dapat disampaikan melalui partai politik sebagai bagian dari proses komunikasi politik. Menurut (Almond & Powell, 1966), partai politik memiliki fungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat dalam sistem politik. Oleh sebab itu, partai politik memiliki hubungan yang penting dalam proses penerimaan dan penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Perkembangan teknologi komunikasi digital juga menyebabkan perubahan dalam pola komunikasi partai politik dengan masyarakat. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada partai politik tanpa harus melalui prosedur komunikasi formal yang panjang. Kondisi tersebut menyebabkan partai politik mulai memanfaatkan media sosial sebagai ruang komunikasi publik sekaligus sarana penerimaan isu masyarakat. Menurut (Cangara, 2016), perkembangan komunikasi politik digital menyebabkan hubungan antara masyarakat dan institusi politik berlangsung secara lebih cepat, terbuka, dan interaktif. Dengan demikian, partai politik pada era digital tidak hanya menjalankan fungsi politik formal, tetapi juga berfungsi sebagai ruang penerimaan aspirasi masyarakat dalam komunikasi digital.

Dalam konteks penelitian ini, partai politik dipahami sebagai institusi politik yang memiliki mekanisme dalam menerima dan mengelola isu masyarakat melalui media sosial sebelum diteruskan kepada pemerintah daerah. DPD Partai Gerindra Lampung menjadi bagian dari proses tersebut melalui mekanisme penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian isu masyarakat kepada Pemerintah

Provinsi Lampung. Oleh karena itu, partai politik dalam penelitian ini diposisikan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mekanisme pengelolaan isu masyarakat.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur mekanisme politik dalam proses pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial DPD Partai Gerindra Lampung dalam penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Penyusunan kerangka pikir ini berangkat dari pemahaman bahwa perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi antara masyarakat dan institusi politik dalam proses penyampaian persoalan publik. Media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana penyebaran informasi politik, tetapi juga berkembang menjadi ruang penerimaan aspirasi digital masyarakat yang memuat berbagai isu sosial, pelayanan publik, maupun persoalan daerah yang disampaikan secara langsung kepada partai politik. Dalam konteks tersebut, isu masyarakat yang disampaikan melalui media sosial dipahami sebagai bagian awal dari mekanisme politik yang berlangsung dalam sistem politik dan kelembagaan organisasi.

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme pengelolaan isu masyarakat berlangsung dalam internal DPD Partai Gerindra Lampung. Fokus utama penelitian diarahkan pada proses penerimaan isu masyarakat melalui media sosial, pengelolaan isu dalam mekanisme internal partai, penyampaian isu kepada Pemerintah Provinsi Lampung, hingga tindak lanjut terhadap persoalan masyarakat yang diteruskan kepada instansi terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas aktivitas politik elektoral maupun strategi politik partai, melainkan secara khusus mengkaji bagaimana mekanisme politik berjalan dalam proses pengelolaan isu masyarakat melalui hubungan antara masyarakat, partai politik, dan pemerintah daerah.

Kerangka pikir penelitian ini menggunakan teori sistem politik David Easton sebagai landasan analisis utama dalam memahami mekanisme politik yang

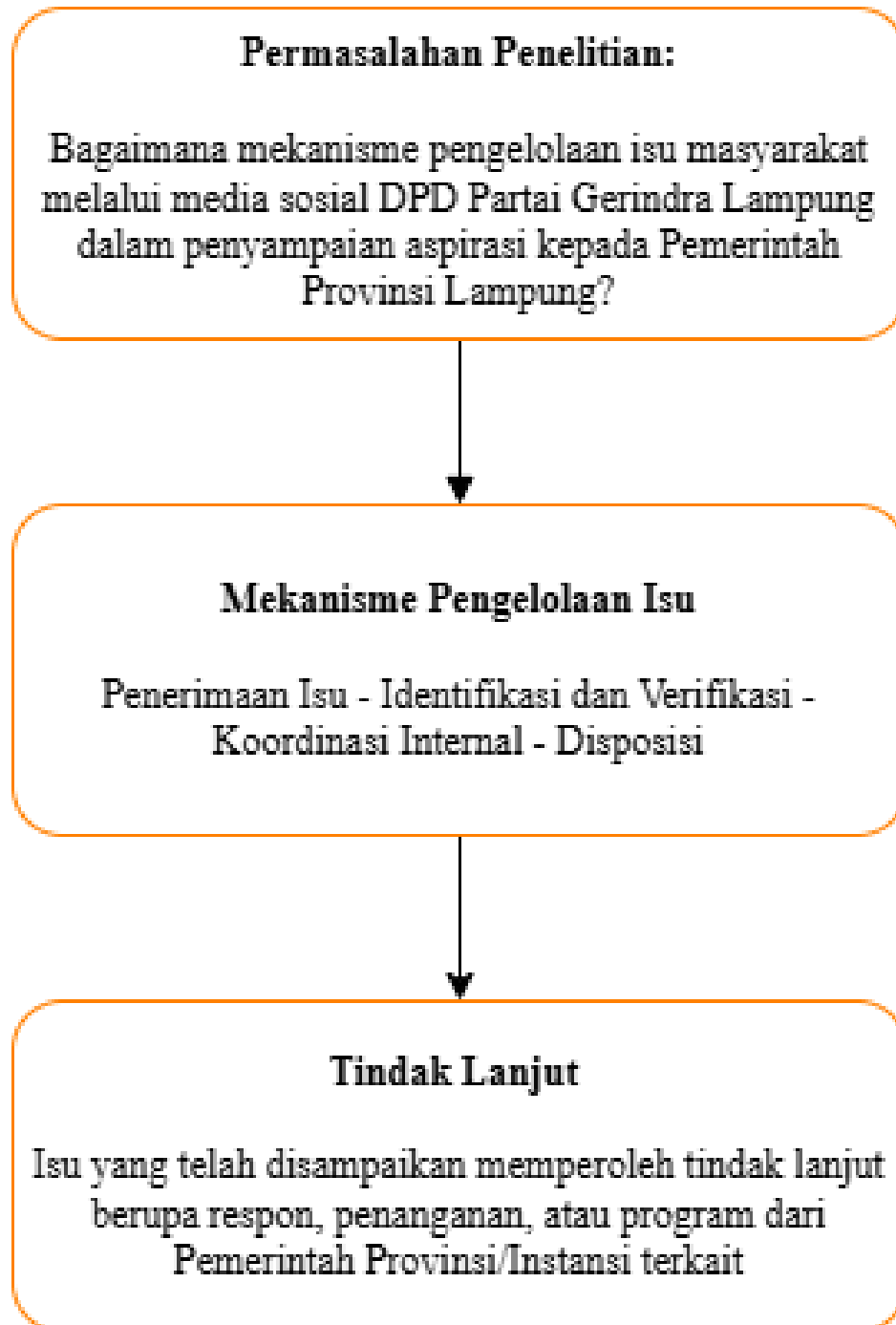
berlangsung dalam penelitian. Menurut (Easton, 1965), sistem politik merupakan suatu proses yang terdiri dari *input*, *process*, dan *output* dalam merespons tuntutan masyarakat. Dalam penelitian ini, isu masyarakat yang disampaikan melalui media sosial dipahami sebagai *input* yang masuk ke dalam sistem politik. Selanjutnya, isu tersebut diproses dalam mekanisme internal DPD Partai Gerindra Lampung sebagai *process* melalui tahapan identifikasi isu, koordinasi internal, pengelolaan informasi, hingga disposisi kepada pihak terkait. Hasil dari proses tersebut kemudian menghasilkan *output* berupa penyampaian isu kepada Pemerintah Provinsi Lampung maupun tindak lanjut terhadap persoalan masyarakat yang disampaikan.

Selain menggunakan teori sistem politik David Easton, penelitian ini juga menggunakan teori kelembagaan dari (Handayani, 1996) untuk melihat bagaimana proses koordinasi, distribusi informasi, dan mekanisme kerja organisasi berlangsung dalam pengelolaan isu masyarakat. Teori kelembagaan digunakan untuk memahami bagaimana DPD Partai Gerindra Lampung menjalankan prosedur internal dalam menerima, mengelola, dan meneruskan isu masyarakat kepada pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, mekanisme pengelolaan isu dipahami sebagai bagian dari proses kelembagaan yang melibatkan hubungan kerja, koordinasi antarbagian, serta distribusi informasi dalam organisasi politik.

Kerangka pikir ini juga menempatkan media sosial sebagai ruang awal masuknya aspirasi digital masyarakat dalam mekanisme politik partai. Isu masyarakat yang disampaikan melalui komentar, pesan langsung, maupun unggahan media sosial selanjutnya melalui proses identifikasi, pengelompokan isu, koordinasi internal, hingga penyampaian kepada Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan substansi persoalan yang diterima. Proses tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan isu masyarakat berlangsung melalui mekanisme yang terstruktur dalam organisasi partai politik.

Melalui kerangka pikir ini, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana mekanisme politik dalam pengelolaan isu masyarakat berjalan dalam struktur kelembagaan DPD Partai Gerindra Lampung. Analisis penelitian difokuskan pada tahapan *input*, *process*, dan *output* dalam teori sistem politik David Easton sehingga dapat diketahui bagaimana isu masyarakat diterima melalui media sosial, dikelola dalam internal partai politik, diteruskan kepada pemerintah daerah, hingga memperoleh tindak lanjut terhadap persoalan masyarakat. Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara media sosial sebagai ruang penerimaan aspirasi digital masyarakat, mekanisme politik dalam pengelolaan isu, mekanisme kelembagaan partai politik, serta tindak lanjut pemerintah daerah dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat.

Bagan kerangka pikir berikut disusun untuk memperjelas hubungan antara media sosial sebagai ruang masuknya aspirasi digital masyarakat, mekanisme politik dalam pengelolaan isu oleh DPD Partai Gerindra Lampung, serta tindak lanjut isu oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari *output* dalam sistem politik David Easton.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam dan spesifik terkait penelitian yang dilakukan sedari awal hingga akhir penelitian. Data yang dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, dan mendeskripsikan dokumen terutama dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang memiliki makna dan mampu menimbulkan pemahaman yang lebih rinci berdasarkan fakta sebenarnya yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial DPD Gerindra Lampung dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah Provinsi Lampung.

Penelitian ini paling tepat menggunakan pendekatan kualitatif karena isu yang dikaji bersifat kontekstual, kompleks, serta memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna dan dinamika komunikasi politik di ruang digital. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial secara holistik melalui observasi, wawancara, serta analisis konten media sosial, sehingga dapat mengungkap bagaimana mekanisme pengelolaan isu DPD Gerindra Lampung dalam menghadapi berbagai isu lokal yang muncul di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan (Sugiyono, 2019) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek, sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti akan melaksanakan penelitian untuk mendapatkan informasi terkait data-data yang diperlukan dalam pemecahan masalah penelitian. Secara umum penelitian akan dilaksanakan di Kota Bandar Lampung dan secara khusus akan dilakukan di DPD Gerindra Provinsi Lampung, Jalan Way Sekampung, Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki peran penting karena menjadi arah utama yang menentukan batasan, ruang lingkup, serta alur dalam proses penelitian. Dengan adanya fokus penelitian, peneliti dapat menentukan aspek-aspek yang perlu diamati, dikaji, dan dianalisis secara lebih mendalam sehingga penelitian tidak berkembang terlalu luas di luar konteks penelitian. Hal ini sejalan dengan pandangan (Lexy J. Moleong, 2014) yang menjelaskan bahwa fokus penelitian merupakan batasan masalah yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian diperlukan agar penelitian berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Selain itu, fokus penelitian juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan dan analisis data sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih efektif. Menurut (Sugiyono, 2019), fokus penelitian merupakan arah atau pusat perhatian penelitian yang digunakan sebagai panduan dalam menentukan data yang relevan dengan penelitian. Oleh karena itu, fokus penelitian menjadi sangat penting karena akan menentukan arah observasi, wawancara, serta analisis yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

Fokus penelitian ini ditetapkan berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun peneliti pada tinjauan pustaka dengan menggunakan teori sistem politik David Easton. Menurut (David Easton, 1953), sistem politik merupakan suatu proses yang terdiri dari *input*, *process*, dan *output* dalam

merespons tuntutan maupun dukungan yang berasal dari masyarakat. Dalam penelitian ini, fokus utama penelitian diarahkan pada mekanisme respons isu masyarakat melalui media sosial DPD Gerindra Provinsi Lampung hingga proses penyampaian isu tersebut kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana isu masyarakat diterima sebagai *input*, kemudian dikelola melalui mekanisme internal partai sebagai *process*, serta menghasilkan tindak lanjut atau respons tertentu sebagai *output*. Dengan demikian, penelitian difokuskan pada alur pengelolaan isu masyarakat yang berlangsung secara kelembagaan dalam proses respons partai politik terhadap aspirasi publik.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data menjadi elemen utama yang akan menentukan kedalaman analisis dan ketepatan interpretasi temuan. Menurut (Moleong, 2014:157), data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki makna tertentu di baliknya, sehingga memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial secara holistik. Sejalan dengan itu, (Sugiyono, 2019:18) menyatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, baik dari manusia, dokumen, maupun perilaku yang diamati secara langsung. Ketepatan dalam memilih data dan jenis sumber data akan mengarahkan ketepatan dan kelayakan informasi yang diperoleh

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, tanpa melalui perantara atau media kedua. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui proses pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau eksperimen. Data ini bersifat otentik karena dihasilkan dari interaksi langsung peneliti dengan subjek atau objek yang diteliti. Dalam konteks penelitian sosial, data primer mencerminkan kondisi aktual pada saat proses pengumpulan data

dilakukan, sehingga tingkat validitasnya cenderung tinggi apabila teknik pengumpulan dilakukan secara tepat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui sumber yang sudah ada sebelumnya atau dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder merupakan data yang berasal dari dokumen, arsip, laporan, publikasi, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data ini berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap data primer, sehingga dapat membantu memberikan konteks, memperkuat analisis, dan memvalidasi temuan lapangan.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian kualitatif karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap topik yang diteliti. Keberadaan informan sangat penting karena informasi yang diberikan akan menjadi dasar dalam memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam. Hal ini sejalan dengan pandangan (Sugiyono, 2019:289) yang menjelaskan bahwa informan penelitian adalah individu yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian kualitatif, yaitu mereka yang memahami permasalahan yang diteliti baik karena mengalami secara langsung maupun memiliki pengetahuan yang relevan terhadap topik tersebut. Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan tertentu agar informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun daftar informan, yaitu:

Tabel 1. 1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan atau Entitas	Alasan Memilih
1.	Panji Maulana	Admin Media Sosial Gerindra Lampung	Memahami proses penerimaan dan pengelolaan isu masyarakat

			melalui media sosial partai.
2.	Anggi Arif Wibowo	Sekretaris Kesekretariatan DPD Gerindra Lampung	Memahami alur koordinasi internal dan mekanisme penyampaian isu dalam organisasi partai.
3.	Ahmad Darmawan	Anggota Kesekretariatan DPD Gerindra Lampung	Terlibat dalam proses administrasi dan distribusi aspirasi masyarakat di lingkungan partai.
4.	Fauzi Heri	Anggota DPRD Provinsi Lampung	Memahami proses penyampaian dan tindak lanjut isu masyarakat kepada pemerintah daerah.
5.	Reynaldo Sitanggung	Pengurus DPD Gerindra Lampung	Mengetahui mekanisme respons dan pengelolaan isu masyarakat di internal partai.
6.	Achmad Fauzan	Masyarakat	Aktif menggunakan media sosial dan mengikuti isu sosial maupun politik daerah.
7.	Maulana Fajri	Masyarakat	Mengikuti perkembangan isu publik melalui media sosial.
8.	Yanti	Masyarakat	Menggunakan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi isu masyarakat.
9.	R. Sigit Krisbintoro	Pengamat Politik dan Akademisi	Memiliki perspektif akademik dan pemahaman mengenai mekanisme politik, media sosial, serta hubungan partai politik dan pemerintah daerah.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk menggali informasi yang mendalam. Bentuk wawancara dapat berupa wawancara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai topik yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali data secara lebih mendalam karena terdapat interaksi langsung antara peneliti dan narasumber. Hal ini sejalan dengan pandangan (Sugiyono, 2019) yang menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung, baik secara tatap muka maupun menggunakan media komunikasi tertentu, antara pewawancara dan narasumber atau informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui arsip, dokumen, foto, video, berita, maupun media lain yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini berguna untuk memperoleh informasi tambahan dan melengkapi data hasil wawancara dan observasi.

3. Observasi (Non-Partisipan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek atau aktivitas yang relevan dengan fokus penelitian tanpa keterlibatan peneliti dalam proses tersebut. Menurut (Sugiyono, 2019), observasi memungkinkan peneliti memahami konteks perilaku secara utuh dan melihat fenomena apa adanya pada situasi alamiah. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap aktivitas media sosial

DPD Gerindra Lampung, seperti pola unggahan, intensitas respons, narasi konten, serta interaksi dengan masyarakat di berbagai platform digital. Teknik ini digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan dokumentasi, sekaligus memberikan gambaran faktual mengenai tingkat responsivitas akun media sosial terhadap isu-isu yang berkembang.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (Singarimbun, 2008 : 2004) sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing data adalah proses awal dalam pengolahan data yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, memiliki kualitas yang layak dianalisis. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali kelengkapan seluruh jawaban, memastikan tidak ada bagian yang terlewat, serta menilai kejelasan informasi agar tidak menimbulkan interpretasi ganda. *Editing* juga mencakup pengecekan konsistensi antara jawaban yang satu dengan lainnya, sehingga data yang diperoleh tetap selaras dengan konteks penelitian. Proses editing data yang diperoleh melalui wawancara dilakukan dengan memeriksa kembali transkrip atau catatan hasil wawancara untuk memastikan setiap jawaban narasumber terdokumentasi secara utuh dan akurat. Sementara itu, pada data yang diperoleh melalui dokumentasi, seperti foto kegiatan, arsip, atau dokumen resmi, editing meliputi seleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian dan pengecekan keaslian dokumen.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses menafsirkan makna dari data yang telah terkumpul agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan relevan dengan tujuan penelitian. Proses interpretasi melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi pola, menemukan hubungan antarvariabel atau tema, membandingkan temuan dengan hasil penelitian terdahulu, dan mengaitkannya dengan teori yang relevan. Peneliti memilih kata-kata yang baik dan cocok sehingga tidak menimbulkan kerugian dari berbagai pihak.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah sistematis untuk mengolah dan menguraikan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tipe penelitian kualitatif deskriptif ini, analisis data dilakukan sejak pengumpulan data yang dilakukan secara terus menerus sampai penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik masih meragukan, peneliti dapat kembali ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan dan kembali mengolahnya.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan “Konsep analisis Interaktif data model Miles dan Huberman” dalam (Sugiyono, 2019). Analisis data ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Maka penjelasannya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumentasi menjadi informasi yang terorganisir. Tahap ini membantu peneliti untuk menyoroiti temuan yang relevan dengan fokus penelitian dan membuang data yang tidak berhubungan. Mereduksi data bertujuan untuk menyaring,

memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengorganisir informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terstruktur, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data tersebut. (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2019) mendefinisikan penyajian data sebagai suatu proses penyusunan informasi secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, grafik, matriks, maupun diagram, yang memungkinkan adanya penarikan makna dari data yang telah dikumpulkan. Pada penelitian ini disajikan data dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial DPD Gerindra dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah Provinsi Lampung.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukungnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Proses ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti senantiasa membuka ruang untuk revisi atau penyesuaian kesimpulan berdasarkan temuan baru yang muncul selama analisis data berlangsung. Dalam hal ini, diharapkan kesimpulan akhir dapat

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal yaitu berkaitan dengan mekanisme pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial oleh DPD Partai Gerindra Lampung dalam proses penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung

3.9 Teknik Validasi Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang dikaji. Menurut Moleong (2017:324), keabsahan data adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan derajat kepercayaan (*credibility*) terhadap hasil penelitian melalui prosedur tertentu. Sementara itu, Sugiyono (2019:270) menjelaskan bahwa validasi data bertujuan untuk menguji kebenaran, ketepatan, dan konsistensi informasi yang diperoleh dari lapangan, sehingga data yang digunakan dalam analisis benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Bentuk triangulasi meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta triangulasi waktu. Adapun teknik triangulasi yang peneliti gunakan yaitu, triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersedia seperti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang sudah ada

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Gambaran Umum DPD Partai Gerindra Lampung

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Lampung merupakan salah satu struktur kepengurusan Partai Gerindra di tingkat daerah yang memiliki fungsi dalam menjalankan aktivitas organisasi, komunikasi politik, serta penyaluran aspirasi masyarakat di Provinsi Lampung. DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung menjadi bagian dari struktur organisasi partai yang berperan dalam menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah melalui berbagai mekanisme politik maupun komunikasi kelembagaan. Dalam pelaksanaannya, DPD Gerindra Lampung menjalankan aktivitas organisasi yang meliputi koordinasi internal partai, pengelolaan komunikasi publik, hingga penerimaan isu masyarakat melalui media sosial maupun saluran komunikasi lainnya.

DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung beralamat di Jalan Way Sekampung, Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung. Lokasi tersebut menjadi pusat aktivitas organisasi partai di tingkat provinsi, termasuk dalam proses koordinasi kepartaian, pelayanan administrasi organisasi, hingga penerimaan berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada partai politik. Selain menjadi pusat kegiatan organisasi, kantor DPD Gerindra Lampung juga menjadi ruang komunikasi antara pengurus partai, anggota

legislatif, kader partai, serta masyarakat yang menyampaikan berbagai persoalan maupun aspirasi publik.

Sebagai kantor organisasi tingkat provinsi, DPD Partai Gerindra Lampung memiliki peran dalam menjalankan berbagai aktivitas kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi partai maupun hubungan komunikasi dengan masyarakat. Aktivitas tersebut meliputi koordinasi antarbidang, pelaksanaan rapat internal organisasi, penyampaian instruksi pimpinan partai, hingga proses pengelolaan isu masyarakat yang diterima melalui berbagai saluran komunikasi. Dalam pelaksanaannya, kesekretariatan DPD Gerindra Lampung menjadi bagian penting dalam membantu proses administrasi organisasi, distribusi informasi, serta koordinasi terhadap berbagai persoalan yang masuk ke lingkungan partai.



Gambar 3. 1 Sekretariat DPD Gerindra Lampung

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Selain menjalankan fungsi organisasi internal, kantor DPD Gerindra Lampung juga menjadi tempat berlangsungnya komunikasi politik antara partai dan masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, kondisi sosial, maupun kebijakan pemerintah daerah melalui audiensi langsung, surat, maupun media sosial

resmi partai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kantor DPD Gerindra Lampung tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi organisasi politik, tetapi juga menjadi ruang penerimaan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dalam mekanisme komunikasi politik daerah.

Dalam perkembangan politik daerah di Provinsi Lampung, Partai Gerindra menjadi salah satu partai politik yang memiliki posisi cukup kuat dalam pemerintahan daerah. Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Gerindra berhasil menjadi salah satu partai pemenang di Provinsi Lampung sehingga memiliki hubungan koordinasi dan komunikasi yang cukup kuat dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Kondisi tersebut turut memengaruhi proses penyampaian isu masyarakat yang diterima partai kepada pemerintah daerah. Menurut (Budiardjo, 2015), partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik dan penghubung kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian, posisi DPD Partai Gerindra Lampung sebagai partai pemenang menyebabkan proses komunikasi dan penyampaian isu masyarakat kepada pemerintah daerah dapat berlangsung lebih terbuka dan koordinatif.



**Gambar 4. 1 RMD Sebagai Gubernur dan Ketua DPD
Gerindra Lampung**

Sumber: Tribun Lampung, 2024

Selain itu, posisi Gubernur Lampung yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung menyebabkan hubungan komunikasi antara partai dan pemerintah daerah berlangsung cukup baik. Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap proses penyampaian dan tindak lanjut isu masyarakat yang diterima partai melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial.

Dalam menjalankan aktivitas organisasi, DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik dan penerimaan aspirasi masyarakat. Media sosial digunakan untuk menyampaikan informasi kegiatan partai sekaligus menerima berbagai persoalan masyarakat yang disampaikan melalui komentar, pesan langsung, maupun platform komunikasi digital lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian dari mekanisme komunikasi politik dan pengelolaan isu masyarakat dalam organisasi partai politik di era digital.

4.1.2 Struktur Organisasi DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Lampung merupakan salah satu struktur organisasi partai politik di tingkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi representasi politik, komunikasi politik, serta penguatan basis elektoral di wilayah Provinsi Lampung. Dalam konteks sistem politik daerah, keberadaan DPD tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai di tingkat pusat, tetapi juga sebagai aktor politik yang berinteraksi langsung dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Hal ini menjadikan DPD Gerindra Lampung memiliki posisi yang penting dalam menjembatani kepentingan antara masyarakat dan pemerintah daerah, sekaligus sebagai sarana artikulasi aspirasi publik dalam proses politik.

Sebagai bagian dari struktur partai politik nasional, DPD Gerindra Lampung memiliki keterkaitan langsung dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam hal arah kebijakan, strategi politik, serta pengelolaan komunikasi publik. Hubungan ini bersifat hierarkis dan koordinatif, di mana kebijakan strategis yang ditetapkan oleh DPP menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan politik di tingkat daerah. Namun demikian, dalam praktiknya, DPD juga memiliki ruang adaptasi terhadap kondisi lokal, sehingga strategi komunikasi politik yang dijalankan dapat disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan dinamika politik masyarakat Provinsi Lampung.

Tabel 2 1 Struktur Pengurus DPD Gerindra Lampung

Jabatan	Nama
Ketua	Rahmat Mirzani Dzausal, S.T., MM.
Sekretaris	Ahmad Giri Akbar, S.E., MBA.
Bendahara	Elly Wahyuni, S.E., M.M
Ketua Dewan Penasehat	Ir. Dwita Ria Gunadi
Wakil Ketua	Fahrorrozi, S.T.
Wakil Sekretaris	Asroni Paslah, S.Pd.

Sumber: Laman web resmi Partai Gerindra Provinsi Lampung (gerindralampung.or.id), 2026

Struktur kepengurusan DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Lampung disusun secara hierarkis yang mencerminkan pembagian peran dan fungsi dalam organisasi kepartaian di tingkat daerah. Berdasarkan data kepengurusan, struktur inti organisasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta unsur penasehat dan wakil ketua yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan roda organisasi partai. Ketua DPD memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan dan strategi politik partai di tingkat daerah, sementara Sekretaris bertanggung jawab dalam aspek administratif dan koordinasi internal organisasi. Bendahara berfungsi dalam pengelolaan keuangan partai, sedangkan unsur penasehat memberikan pertimbangan strategis dalam pengambilan keputusan politik.

Lebih lanjut, keberadaan wakil ketua dalam struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian tugas yang lebih spesifik dan terarah dalam menjalankan fungsi-fungsi kepartaian, termasuk dalam bidang komunikasi politik dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat. Pembagian peran ini mencerminkan adanya diferensiasi fungsi dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja serta memastikan bahwa setiap aspek kegiatan politik dapat dijalankan secara optimal sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks ini, wakil ketua tidak hanya berperan sebagai pendukung kepemimpinan utama, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki fungsi koordinatif dan operasional dalam mengelola berbagai aktivitas kepartaian, termasuk dalam ranah komunikasi politik digital.

Struktur kepengurusan ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka organisasi yang bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan partai, termasuk dalam pengelolaan komunikasi politik melalui media sosial. Setiap keputusan yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada publik, penyusunan narasi politik, hingga respons terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, tidak terlepas dari mekanisme koordinasi internal yang melibatkan berbagai unsur dalam struktur kepartaian. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi politik dalam organisasi partai tidak bersifat individual, melainkan kolektif dan terintegrasi dalam sistem organisasi yang terstruktur.

Dalam konteks komunikasi politik digital, keberadaan struktur organisasi ini berperan sebagai *control mechanism* yang mengatur alur distribusi informasi serta memastikan konsistensi pesan yang disampaikan kepada publik. Dengan adanya mekanisme ini, setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh partai, khususnya

melalui media sosial, tidak hanya mempertimbangkan aspek kecepatan dan keterbukaan informasi, tetapi juga memperhatikan keselarasan dengan kepentingan strategis partai serta stabilitas hubungan politik dengan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, responsivitas media sosial partai tidak dapat dipahami sebagai respons yang sepenuhnya spontan, melainkan sebagai hasil dari proses organisasi yang melibatkan pertimbangan struktural, politis, dan strategis dalam setiap pengambilan keputusan komunikasi.

4.1.3 Mekanisme Penyampaian Isu Masyarakat di DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung

Mekanisme penyampaian isu masyarakat di DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung merupakan bagian dari proses komunikasi politik dan pengelolaan aspirasi masyarakat yang berlangsung dalam organisasi partai. Mekanisme tersebut digunakan untuk menerima, mengelola, serta menyampaikan berbagai persoalan masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadap penyelesaian isu tersebut. Dalam pelaksanaannya, proses penyampaian isu masyarakat tidak hanya berlangsung melalui komunikasi secara langsung, tetapi juga berkembang melalui penggunaan media sosial sebagai ruang penerimaan aspirasi digital masyarakat.

Proses penyampaian isu masyarakat umumnya dimulai dari masuknya berbagai persoalan masyarakat melalui media sosial partai, seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter) sebagai platform komunikasi digital. Selain melalui media sosial, isu masyarakat juga dapat diterima melalui audiensi langsung, laporan kader partai, maupun komunikasi masyarakat dengan pengurus partai. Berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat tersebut kemudian menjadi bagian awal dalam mekanisme pengelolaan isu di internal organisasi partai.

Setelah isu diterima, DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung melakukan proses identifikasi dan pengelompokan terhadap persoalan masyarakat yang masuk. Proses tersebut dilakukan untuk mengetahui jenis persoalan, tingkat urgensi, serta pihak yang berkaitan dengan isu yang disampaikan masyarakat. Pengelompokan isu diperlukan agar proses tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan substansi persoalan yang diterima. Dalam mekanisme tersebut, isu yang dianggap memiliki tingkat urgensi tinggi umumnya memperoleh perhatian lebih cepat untuk segera diteruskan kepada pihak terkait.

Selanjutnya, isu masyarakat yang telah diidentifikasi akan melalui proses koordinasi internal organisasi. Proses koordinasi dilakukan antara kesekretariatan, pimpinan partai. Koordinasi tersebut bertujuan untuk menentukan bentuk tindak lanjut, pihak yang memiliki kewenangan terhadap persoalan tersebut, serta langkah yang akan dilakukan organisasi dalam merespons isu masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi organisasi dilakukan melalui rapat internal, komunikasi pengurus, maupun disposisi kepada pihak tertentu.

Mekanisme penyampaian isu masyarakat juga melibatkan hubungan koordinasi antara DPD Partai Gerindra Lampung dengan Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung/Kota maupun pemerintah daerah. Isu masyarakat yang telah melalui proses koordinasi internal selanjutnya dapat diteruskan kepada DPRD, instansi pemerintah, maupun pihak terkait lainnya sesuai dengan substansi persoalan yang disampaikan masyarakat. Proses penyampaian tersebut dapat dilakukan melalui jalur formal maupun komunikasi koordinatif antara partai politik dan pemerintah daerah.

Selain itu, posisi Partai Gerindra sebagai partai pemenang di Provinsi Lampung turut memengaruhi kelancaran proses

komunikasi dalam penyampaian isu masyarakat kepada pemerintah daerah. Hubungan koordinasi yang cukup baik antara partai politik, anggota legislatif, dan pemerintah daerah menyebabkan proses penyampaian isu masyarakat dapat berlangsung secara lebih terbuka dan komunikatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian isu masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh struktur organisasi partai, tetapi juga oleh hubungan kelembagaan antara partai politik dan pemerintah daerah.

Melalui mekanisme tersebut, DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung berupaya menjalankan fungsi komunikasi politik dan penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, mekanisme penyampaian isu masyarakat di DPD Partai Gerindra Lampung menunjukkan adanya proses penerimaan isu, koordinasi internal, disposisi, hingga penyampaian isu kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pengelolaan aspirasi masyarakat dalam organisasi partai politik.

4.1.4 Media Sosial DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung

Perkembangan teknologi komunikasi digital menyebabkan media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang banyak digunakan oleh lembaga politik dalam menyampaikan informasi maupun membangun komunikasi dengan masyarakat. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai ruang publikasi kegiatan organisasi, tetapi juga berkembang menjadi sarana interaksi antara masyarakat dan partai politik dalam proses penyampaian aspirasi publik. Menurut (Nasrullah, 2017), media sosial merupakan medium berbasis internet yang memungkinkan pengguna melakukan interaksi, pertukaran informasi, serta membangun komunikasi secara terbuka dalam ruang digital. Dalam konteks tersebut, media sosial menjadi bagian penting dalam aktivitas komunikasi politik pada era digital.

DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik dan penyebaran informasi organisasi kepada masyarakat. Penggunaan media sosial dilakukan untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai kegiatan partai, aktivitas kader, agenda organisasi, hingga informasi yang berkaitan dengan persoalan masyarakat di Provinsi Lampung. Selain digunakan sebagai sarana publikasi, media sosial juga menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan partai politik melalui berbagai bentuk interaksi digital.

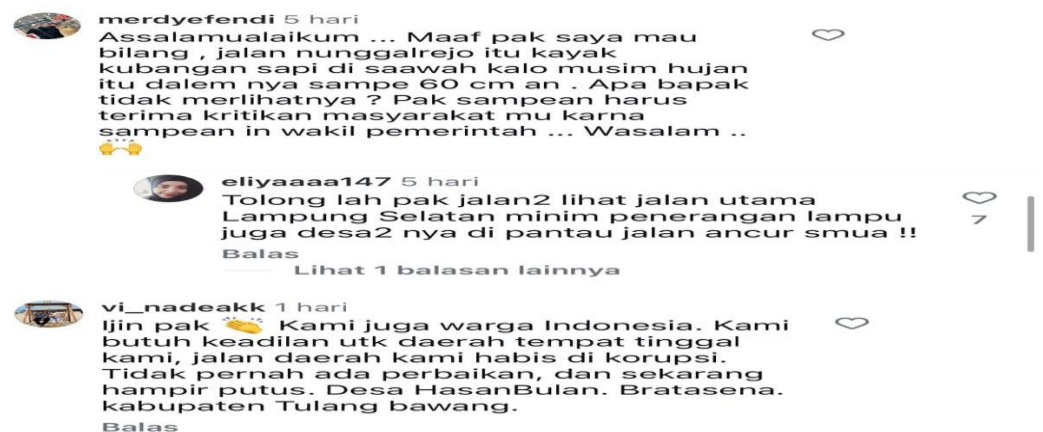


Gambar 5. 1 Pengelolaan Media Sosial DPD Gerindra Lampung

Sumber: Instagram @gerindralampung

Adapun media sosial yang digunakan oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung meliputi Instagram, TikTok, dan X (Twitter) sebagai platform komunikasi digital. Penggunaan berbagai platform tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan komunikasi organisasi kepada masyarakat. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyampaikan komentar, kritik, keluhan, maupun aspirasi yang berkaitan dengan berbagai persoalan publik di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian dari mekanisme komunikasi antara masyarakat dan partai politik dalam ruang digital.

Selain sebagai sarana komunikasi publik, media sosial DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung juga digunakan sebagai ruang penerimaan isu masyarakat. Berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat melalui komentar, pesan langsung, maupun unggahan media sosial menjadi bagian awal dari proses pengelolaan isu dalam internal organisasi partai. Persoalan tersebut umumnya berkaitan dengan pelayanan publik, kondisi infrastruktur, bantuan sosial, persoalan ekonomi masyarakat, hingga berbagai isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Kehadiran media sosial menyebabkan masyarakat dapat menyampaikan persoalan secara lebih cepat dan langsung kepada partai politik tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang komunikasi publik yang mempertemukan masyarakat dengan institusi politik dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat.



Gambar 6. 1 Kolom komentar DPD Gerindra menjadi tempat pengaduan

Sumber: Instagram @gerindralampung

Isu yang diterima melalui media sosial selanjutnya dikelola melalui mekanisme koordinasi internal sebelum diteruskan kepada pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Dalam proses tersebut, isu masyarakat terlebih dahulu melalui tahapan identifikasi dan pengelompokan berdasarkan jenis persoalan, tingkat urgensi, serta

pihak yang memiliki kewenangan terhadap isu yang disampaikan masyarakat. Setelah itu, isu akan diteruskan kepada bidang atau pihak terkait di lingkungan internal partai untuk dibahas lebih lanjut melalui mekanisme koordinasi organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya digunakan sebagai ruang interaksi digital, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan isu masyarakat dalam organisasi partai politik.

Media sosial dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai sarana penyebaran informasi politik, tetapi juga sebagai ruang penerimaan aspirasi digital masyarakat dalam mekanisme politik partai. Kehadiran media sosial menyebabkan proses penerimaan isu masyarakat berlangsung lebih terbuka dan dinamis karena masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada partai politik kapan saja tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Selain itu, media sosial juga memungkinkan suatu isu berkembang dengan cepat menjadi perhatian publik karena informasi yang disampaikan dapat tersebar secara luas melalui interaksi antar pengguna media sosial.

Penggunaan media sosial dalam aktivitas organisasi juga menunjukkan adanya perubahan pola komunikasi politik yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi lebih terbuka dan interaktif. Pada pola komunikasi konvensional, penyampaian aspirasi masyarakat umumnya dilakukan melalui pertemuan langsung, surat, maupun prosedur administratif tertentu. Namun dalam perkembangan komunikasi digital saat ini, masyarakat dapat menyampaikan kritik, keluhan, maupun aspirasi secara langsung melalui media sosial partai politik. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi politik, tetapi juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi politik melalui ruang digital.

4.1.5 Posisi Gerindra sebagai Partai Pemenang di Provinsi Lampung

Partai Gerindra merupakan salah satu partai politik yang memiliki posisi cukup kuat dalam dinamika politik daerah di Provinsi Lampung. Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Gerindra berhasil menjadi salah satu partai pemenang dengan memperoleh dukungan politik yang signifikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberhasilan tersebut menyebabkan Partai Gerindra memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses komunikasi politik dan hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa Partai Gerindra memiliki posisi strategis dalam proses penyampaian dan penyaluran berbagai persoalan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Posisi Partai Gerindra sebagai partai pemenang turut memengaruhi hubungan koordinasi antara partai politik dan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan isu masyarakat. Hubungan komunikasi yang terjalin antara DPD Partai Gerindra Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung berlangsung secara cukup terbuka dan koordinatif karena adanya keterhubungan politik antara struktur partai dan pemerintahan daerah. Selain itu, posisi Gubernur Lampung yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung menyebabkan hubungan komunikasi antara partai dan pemerintah daerah berjalan lebih dekat dalam proses penyampaian isu masyarakat.

Kondisi tersebut menyebabkan berbagai persoalan masyarakat yang diterima melalui media sosial maupun saluran komunikasi lainnya memiliki jalur koordinasi yang relatif lebih mudah untuk diteruskan kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait. Dalam konteks ini, DPD Partai Gerindra Lampung tidak hanya menjalankan fungsi organisasi politik, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses penyampaian

aspirasi publik. Menurut (Budiardjo, 2015), partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian, posisi Partai Gerindra sebagai partai pemenang turut memengaruhi proses komunikasi dan penyampaian isu masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain memengaruhi hubungan komunikasi politik, posisi Partai Gerindra sebagai partai pemenang juga memberikan pengaruh terhadap proses koordinasi dalam pengelolaan isu masyarakat. Berbagai persoalan masyarakat yang dianggap memiliki tingkat urgensi tinggi dapat lebih cepat memperoleh perhatian karena adanya hubungan koordinasi yang cukup kuat antara partai politik, anggota legislatif, dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyampaian isu masyarakat tidak hanya berlangsung melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui komunikasi koordinatif yang dilakukan dalam hubungan kelembagaan antara partai dan pemerintah daerah.

Dalam perkembangan politik daerah di Provinsi Lampung, posisi Partai Gerindra sebagai partai pemenang juga memperlihatkan adanya hubungan yang cukup erat antara komunikasi politik digital dan mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat. Media sosial yang digunakan partai politik tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi publik, tetapi juga menjadi sarana penerimaan berbagai persoalan masyarakat yang selanjutnya dapat diteruskan kepada pemerintah daerah melalui hubungan koordinasi yang telah terbangun. Oleh karena itu, posisi Partai Gerindra sebagai partai pemenang menjadi salah satu faktor yang mendukung berlangsungnya proses komunikasi dan pengelolaan isu masyarakat di Provinsi Lampung.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyampaian isu masyarakat kepada DPD Partai Gerindra Lampung dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter), serta melalui kegiatan reses, PIP-WK, laporan kader, dan komunikasi langsung dengan masyarakat. Media sosial menjadi sarana yang paling dominan karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan, kritik, maupun aspirasi kepada partai politik.

Pengelolaan isu masyarakat di DPD Partai Gerindra Lampung dilakukan melalui mekanisme koordinasi internal yang melibatkan pimpinan partai, kesekretariatan, dan pengurus partai. Isu yang diterima tidak langsung diteruskan kepada pemerintah daerah, tetapi terlebih dahulu dibahas melalui rapat koordinasi, komunikasi internal, dan disposisi untuk menentukan tindak lanjut yang sesuai. Meskipun belum memiliki *standar operasional prosedur* (SOP) yang dibakukan secara tertulis, mekanisme pengelolaan isu tetap berjalan melalui pola koordinasi yang telah diterapkan dalam organisasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa isu masyarakat yang telah dikelola kemudian disampaikan kepada Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, pemerintah daerah, maupun instansi terkait sesuai dengan substansi persoalan yang dihadapi masyarakat. Posisi Partai Gerindra sebagai partai pemenang di Provinsi Lampung turut mendukung kelancaran komunikasi dan koordinasi

dalam proses tersebut. Selain itu, isu yang memperoleh perhatian luas di media sosial cenderung mendapatkan respons dan tindak lanjut yang lebih cepat, sebagaimana terlihat pada persoalan harga singkong yang memperoleh perhatian dan pembahasan lebih lanjut oleh pihak terkait.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. DPD Partai Gerindra Lampung perlu mengoptimalkan fungsi media sosial tidak hanya sebagai sarana publikasi kegiatan partai, tetapi juga sebagai kanal pelaporan isu dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang yang lebih jelas untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik secara cepat dan mudah.
2. DPD Partai Gerindra Lampung perlu memastikan bahwa setiap isu yang disampaikan masyarakat melalui media sosial memperoleh perhatian dan tindak lanjut melalui mekanisme internal organisasi. Hal tersebut penting agar media sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi publik, tetapi juga sebagai sarana penerimaan dan pengelolaan isu masyarakat secara berkelanjutan.
3. DPD Partai Gerindra Lampung perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan isu masyarakat melalui media sosial yang mencakup proses penerimaan, koordinasi, disposisi, hingga penyampaian isu kepada pihak terkait. Penyusunan SOP diperlukan untuk menciptakan mekanisme kerja yang lebih terstruktur, konsisten, dan efektif dalam pengelolaan isu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*.
- Argenti, P. A. (2013). *Corporate Communication*.
- Arianto, B. (2021). *Media Sosial sebagai Saluran Aspirasi Kewargaan: Studi Pembahasan RUU Cipta Kerja*.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi politik: Konsep, teori, dan strategi*. Rajawali Pers.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2009). *Effective Public Relations*.
- Easton, D. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*.
- Goni, M. G. H. (n.d.). *Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014–2019*.
- Handayani, S. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*.
- Informan, D. (2026). *Dokumentasi Wawancara Penelitian*.
- Lampung, M. S. D. P. D. G. (2026). *Instagram, TikTok, dan X (Twitter) DPD Partai Gerindra Lampung*.

- Lampung, P. G. P. (2026). *Struktur Pengurus DPD Gerindra Lampung*.
<https://gerindralampung.or.id>
- Lampung, T. (2024). *Partai Gerindra Menjadi Salah Satu Partai Pemenang di Provinsi Lampung*.
- Lampung, T. (2026). *Perkembangan Harga Singkong di Provinsi Lampung*.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of Communication Theory*.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). *The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life*.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail*.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*.
- Nova, F. (2011). *Crisis Public Relations*.
- Pakuningjati, A. L. (2015). *Pengelolaan Media Sosial dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pengelolaan Media Sosial LAPOR! sebagai Sarana Aspirasi dan Pengaduan Rakyat secara Online oleh Deputi I Kantor Staf Presiden)*.
- Peneliti, D. (2026). *Dokumentasi Penelitian di DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung*.
- Peters, B. G. (2011). *Institutional Theory in Political Science*.
- Regester, M., & Larkin, J. (2008). *Risk Issues and Crisis Management in Public*

Relations.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*.

Rosyari, F. R. (n.d.). *Efektivitas Pengelolaan Data Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda) pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran DPD RI*.

Santoso, P. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*.

Siagian, S. P. (2008). *Filsafat Administrasi*.

Singarimbun, M. (2008). *Metode Penelitian Survei*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Thoha, M. (2014). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*.

Van Dijk, J. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*.

Widjaja, H. A. W. (2010). *Administrasi Kepegawaian*.

Yanuar, F., & Ekayanthi, D. (2020). *Analisis Pemanfaatan Media Sosial di Indonesia untuk Penyampaian Aspirasi Politik*.